

COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL BETWEEN VILLAGE GOVERNMENT AND PT. TRION INDONESIA RAYA IN STRENGTHENING THE LOCAL COMMUNITY ECONOMY: A CASE STUDY OF CURAHSAWO VILLAGE

Aaliya Annisa

Universitas Panca Marga
putrialiaa901@gmail.com

Siti Marwiyah

Universitas Panca Marga

Mastina Maksain

Universitas Panca Marga
mastinamaksin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik *collaborative governance* antara Pemerintah Desa Curahsawo dan PT Trion Indonesia Raya dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Fokus penelitian mencakup bentuk kolaborasi, pembagian peran antaraktor, mekanisme interaksi, serta implikasinya terhadap dinamika ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait program kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung dalam kelembagaan yang integratif melalui interaksi berkelanjutan antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung kelembagaan, sedangkan PT Trion Indonesia Raya memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan akses pasar. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kolaborasi didukung oleh komunikasi yang intensif, kepercayaan antaraktor, dan kepemimpinan adaptif sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan usaha mikro, perluasan akses pemasaran, serta penguatan kapasitas manajerial. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketergantungan pada dukungan eksternal, perbedaan karakter organisasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* ditentukan oleh kualitas relasi sosial dan kapasitas kelembagaan yang menopang proses kolaborasi.

Kata kunci: collaborative governance, pembangunan desa, ekonomi lokal, kemitraan publik-swasta, pemberdayaan masyarakat

Abstract

This study examines the practice of *collaborative governance* between the Curahsawo Village Government and PT Trion Indonesia Raya in strengthening the local community's economy. The study focuses on the forms of collaboration, the distribution of roles among stakeholders, the mechanisms of interaction, and their implications for local economic dynamics. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis of partnership programs. The findings reveal that collaboration operates through an integrative institutional framework characterized by continuous interaction among the village government, the private sector, and the community. The village government acts as a facilitator and institutional coordinator, while PT Trion Indonesia Raya provides financial support, technology, and market access. Community members actively participate in planning, implementation, and evaluation processes. The collaboration is sustained by intensive communication, mutual trust, and adaptive leadership, contributing to increased household income, the growth of micro-enterprises, expanded market access, and improved managerial capacity. However, challenges remain, including dependence on external support, differences in organizational characteristics, and limited human resource capacity. These findings demonstrate that the success of *collaborative governance* depends not only on resource integration but also on the quality of social relationships and institutional capacity that underpin the collaborative process.

Keywords: collaborative governance, rural development, local economy, public-private partnership, community empowerment.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pedesaan menempati posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional karena desa berfungsi sebagai ruang produksi, reproduksi sosial, sekaligus basis ketahanan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, desa tidak lagi diposisikan sekadar unit administratif, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat orientasi tersebut melalui mandat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Orientasi kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pembangunan yang berpusat pada negara menuju

pembangunan berbasis komunitas yang menekankan partisipasi, inovasi lokal, serta penguatan kapasitas institusional desa.¹

Kapasitas desa dalam mengelola pembangunan ekonomi seringkali berhadapan dengan keterbatasan struktural yang mencakup akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, serta jaringan pasar yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong munculnya pendekatan tata kelola yang lebih adaptif melalui keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah desa. Literatur governance kontemporer menegaskan bahwa kompleksitas persoalan publik menuntut pola interaksi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan yang beragam dalam satu kerangka kolaboratif.²

Dalam konteks tersebut, konsep collaborative governance menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk membaca dinamika kemitraan pembangunan desa. Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum formal berbasis konsensus.³ Perspektif ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Emerson et al. (2012) yang menekankan pentingnya dimensi sistemik dalam kolaborasi, mencakup interaksi institusional, kepemimpinan kolaboratif, serta pembangunan kepercayaan antaraktor.⁴ Kerangka ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, melainkan sebagai proses sosial yang membentuk relasi kekuasaan, legitimasi, dan distribusi manfaat dalam kebijakan publik.

Dalam ranah pembangunan perdesaan, pendekatan kolaboratif membuka ruang bagi integrasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan

¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun 2020 (Jakarta: Kemendes PDTT, 2020)

² John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Melissa M. Stone, "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging," *Public Administration Review* 75, no. 5 (2015): 647–663, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29

³ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2007): 543–571

⁴ Emerson, Nabatchi, dan Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," 1–29.

sektor swasta dalam merancang serta mengimplementasikan program pembangunan. Ranggi Ade Febrian menekankan bahwa pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan keterlibatan multipihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.⁵ Pandangan ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas program pembangunan ekonomi lokal.⁶ Pada saat yang sama, kajian mutakhir juga mengingatkan adanya potensi ketimpangan relasi antaraktor yang dapat memengaruhi arah dan hasil kolaborasi, terutama ketika aktor dengan sumber daya lebih besar memiliki posisi dominan dalam proses pengambilan keputusan.⁷

Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menghadirkan konteks empiris yang mencerminkan dinamika tersebut. Struktur ekonomi masyarakat desa masih ditopang oleh sektor usaha mikro dan aktivitas berbasis sumber daya lokal yang menghadapi keterbatasan akses modal, kapasitas manajerial, serta konektivitas pasar. Dalam merespons kondisi tersebut, Pemerintah Desa Curahsawo menjalin kemitraan dengan PT Trion Indonesia Raya sebagai aktor sektor swasta yang memiliki kapasitas dalam penyediaan investasi, pelatihan, dan jaringan pemasaran. Interaksi antara kedua aktor ini menunjukkan upaya integrasi sumber daya publik dan privat yang diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat desa secara lebih terstruktur.

Meskipun praktik kolaborasi tersebut telah berjalan, eksplorasi akademik mengenai mekanisme, pola relasi, serta implikasi ekonominya masih relatif terbatas, terutama dalam konteks kemitraan antara pemerintah desa dan korporasi di wilayah pedesaan Indonesia. Sebagian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada relasi antara pemerintah dan

⁵ Ranggi Ade Febrian, "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan," WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi (2018)

⁶ B. Setiawati dan H. Suparti, "Kapabilitas Pemerintahan Desa dalam Collaborative Governance," PubBis (2025), A. Apriliani et al., "Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM," Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat (2024)

⁷ Eva Sørensen dan Jacob Torfing, "The Democratizing Impact of Governance Networks: From Pluralization, via Democratic Anchorage, to Interactive Political Leadership," Public Administration 96, no. 2 (2018): 302–317

masyarakat atau organisasi non-profit, sehingga dimensi keterlibatan sektor swasta dalam governance desa belum banyak dikaji secara mendalam.⁸ Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan praktik kolaborasi, melainkan juga menganalisis konfigurasi kelembagaan, distribusi peran, serta dampaknya terhadap dinamika ekonomi lokal secara lebih komprehensif.

Untuk menjawab kebutuhan analitis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik collaborative governance dalam konteks lokal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap pengalaman, persepsi, serta dinamika interaksi antaraktor yang tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif semata.⁹ Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci yang terlibat dalam kolaborasi, observasi partisipatif terhadap aktivitas ekonomi desa, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan program kemitraan dan perencanaan pembangunan desa. Informan penelitian mencakup pemerintah desa, perwakilan PT Trion Indonesia Raya, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program kolaborasi.

Proses analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kolaborasi, distribusi peran antaraktor, serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.¹⁰ Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta verifikasi temuan melalui proses member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan realitas empiris yang diamati.

⁸ Budi Irawan, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15, no. 2 (2017): 200–210, Bryson, Crosby, dan Stone, "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations," 647–663.

⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014)

¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014)

Fokus kajian diarahkan pada analisis bentuk dan mekanisme collaborative governance antara Pemerintah Desa Curahsawo dan PT Trion Indonesia Raya, termasuk bagaimana relasi antaraktor dibangun, dinegosiasikan, serta diimplementasikan dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Perhatian khusus juga diberikan pada bagaimana kolaborasi tersebut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam penguatan usaha mikro dan aktivitas ekonomi berbasis lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik *collaborative governance* antara Pemerintah Desa Curahsawo dan PT Trion Indonesia Raya dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap proses kolaborasi, pola interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kemitraan.¹¹ Fokus penelitian diarahkan pada bentuk kolaborasi, pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlangsungan kerja sama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹²

Lokasi penelitian berada di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, yang menjadi lokasi pelaksanaan program kemitraan antara pemerintah desa dan PT Trion Indonesia Raya. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan kolaborasi.¹³ Informan meliputi pemerintah desa, perwakilan PT Trion Indonesia Raya, pengelola program, pelaku usaha, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan

¹¹ Metode Penelitian Kualitatif, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9–12.

¹² Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 43–46.

¹³ Qualitative Research & Evaluation Methods, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015), hlm. 264–267.

observasi partisipatif, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen, seperti laporan kegiatan, dokumen perencanaan desa, nota kesepahaman, dan arsip lain yang relevan dengan penelitian.¹⁴

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.¹⁵ Proses analisis berlangsung secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi yang terjadi. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh para informan.¹⁶ Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai.

HASIL DAN DISKUSI

Konfigurasi Collaborative Governance antara Pemerintah Desa dan PT Trion Indonesia Raya

Anda Temuan lapangan memperlihatkan bahwa praktik collaborative governance di Desa Curahsawo tidak berhenti pada pola kemitraan administratif, melainkan berkembang menjadi konfigurasi kelembagaan yang relatif stabil dan berlapis. Relasi antara pemerintah desa, PT Trion Indonesia Raya, serta masyarakat tidak sekadar terhubung melalui program kerja, melainkan terjalin melalui interaksi berulang yang membentuk norma kolaboratif, ekspektasi bersama, serta mekanisme koordinasi yang semakin matang. Struktur ini menunjukkan karakteristik kolaborasi yang bergerak dari tahap koordinatif menuju tahap integratif, di mana masing-masing aktor mulai menyesuaikan peran dan strategi berdasarkan kebutuhan kolektif.

¹⁴ Creswell dan Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*, hlm. 157–170.

¹⁵ Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 31–33.

¹⁶ Naturalistic Inquiry, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1985), hlm. 289–331.

Pemerintah desa memainkan fungsi strategis sebagai simpul institusional yang menghubungkan kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Peran ini tidak hanya terlihat pada aspek fasilitasi administratif, tetapi juga pada kemampuan mengorkestrasi agenda pembangunan agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Pada saat yang sama, PT Trion Indonesia Raya menghadirkan kapasitas yang tidak dimiliki oleh pemerintah desa, terutama dalam hal investasi, inovasi teknologi, serta akses ke jaringan distribusi yang lebih luas. Interaksi ini menciptakan bentuk pertukaran sumber daya yang saling melengkapi, sehingga memperkuat kapasitas kolektif dalam mengelola potensi ekonomi desa.

Dimensi penting lain yang muncul adalah keterlibatan masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses kolaborasi. Partisipasi tidak berhenti pada tahap implementasi program, melainkan telah masuk ke ranah perencanaan dan evaluasi. Forum dialog yang diselenggarakan secara periodik membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan jenis usaha, serta mengevaluasi efektivitas program yang berjalan. Pola ini sejalan dengan karakter deliberatif dalam collaborative governance yang menempatkan proses komunikasi sebagai fondasi utama dalam membangun konsensus dan legitimasi.¹⁷

Mekanisme operasional kolaborasi tersusun melalui beberapa instrumen, antara lain rapat koordinasi lintas aktor, forum partisipatif masyarakat, serta sistem monitoring berbasis evaluasi berkala. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan adanya struktur proses yang relatif jelas, sehingga interaksi antaraktor tidak berlangsung secara sporadis. Febrian (2018) menekankan pentingnya kejelasan proses kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan, terutama dalam menjaga konsistensi komitmen dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.¹⁸ Dalam konteks Curahsawo, keberlanjutan forum komunikasi menjadi faktor

¹⁷ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2007): 543–571, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29

¹⁸ Rangi Ade Febrian, "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* (2018)

kunci yang menjaga stabilitas hubungan antaraktor sekaligus meminimalisasi potensi konflik kepentingan.

Distribusi Peran dan Relasi Kekuasaan dalam Kolaborasi

Distribusi peran dalam kolaborasi memperlihatkan pola diferensiasi fungsi yang cukup jelas, meskipun dalam praktiknya tetap bersifat dinamis. Pemerintah desa berperan sebagai pengatur arah kebijakan, penjaga legitimasi, sekaligus mediator dalam mengelola potensi friksi antaraktor. Fungsi ini menjadi krusial dalam konteks desa, di mana legitimasi sosial memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan implementasi program. Kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah desa tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi yang dilakukan oleh pihak swasta.

PT Trion Indonesia Raya mengambil posisi sebagai aktor yang menyediakan sumber daya strategis, terutama dalam bentuk modal, pelatihan teknis, serta akses pasar. Peran ini memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi secara langsung dalam memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Temuan ini beririsan dengan kajian Apriliani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan desa mampu mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat.¹⁹

Relasi antara kedua aktor tersebut tidak sepenuhnya bebas dari dinamika kekuasaan. Perbedaan kapasitas sumber daya berpotensi menciptakan ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada beberapa situasi, inisiatif program lebih banyak didorong oleh pihak perusahaan yang memiliki keunggulan dalam akses informasi dan teknologi. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan asimetri relasi yang sering ditemukan dalam kemitraan publik-swasta, di

¹⁹ A. Apriliani et al., "Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM," Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat (2024)

mana aktor dengan sumber daya lebih besar memiliki peluang lebih luas dalam menentukan arah kebijakan.²⁰

Masyarakat desa menempati posisi sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Keterlibatan mereka tidak hanya bersifat operasional, melainkan juga mencakup proses pembelajaran sosial yang meningkatkan kapasitas individu dan kolektif. Hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan orientasi ekonomi masyarakat, dari pola subsisten menuju pola usaha yang lebih produktif dan berorientasi pasar. Transformasi ini mencerminkan adanya proses adaptasi yang dipicu oleh interaksi intensif antara masyarakat dan aktor lain dalam kerangka kolaborasi.

Implikasi terhadap Dinamika Ekonomi Lokal

Implementasi collaborative governance menghasilkan perubahan yang dapat diamati pada berbagai indikator ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan rumah tangga menjadi salah satu indikator yang paling menonjol, terutama pada kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam program kemitraan. Selain itu, munculnya unit usaha baru serta diversifikasi produk lokal menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang lebih progresif dibandingkan periode sebelum kolaborasi berlangsung.

Akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis berkontribusi pada peningkatan kualitas produk serta efisiensi proses produksi. Masyarakat mulai mengadopsi praktik manajemen usaha yang lebih sistematis, termasuk pencatatan keuangan, pengelolaan stok, serta strategi pemasaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kondisi ini memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas manajerial yang sebelumnya menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha mikro di desa.

Jaringan pemasaran yang difasilitasi oleh PT Trion Indonesia Raya membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan volume penjualan, tetapi juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam rantai

²⁰ Eva Sørensen dan Jacob Torfing, "The Democratizing Impact of Governance Networks: From Pluralization, via Democratic Anchorage, to Interactive Political Leadership," *Public Administration* 96, no. 2 (2018): 302–317

distribusi. Susanti dan Putra (2022) menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan efek berganda dalam perekonomian lokal melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan akses pasar.²¹ Temuan di Curahsawo menunjukkan pola yang sejalan dengan argumentasi tersebut, meskipun intensitas dampaknya bervariasi antar kelompok masyarakat.

Selain aspek ekonomi, perubahan juga terlihat pada dimensi sosial, khususnya dalam peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola usaha. Partisipasi aktif dalam forum kolaboratif mendorong terbentuknya ruang belajar kolektif yang memperkuat kapasitas sosial komunitas. Interaksi yang intensif antaraktor menciptakan transfer pengetahuan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko usaha.

Dinamika Tantangan dalam Implementasi Kolaborasi

Di balik capaian yang dihasilkan, praktik collaborative governance di Curahsawo memperlihatkan sejumlah dinamika yang memerlukan perhatian kritis. Ketergantungan terhadap dukungan eksternal, terutama dari pihak perusahaan, menjadi salah satu isu yang muncul dalam proses implementasi. Sebagian pelaku usaha masih menunjukkan kecenderungan menunggu inisiatif dari pihak eksternal dalam pengembangan usaha, sehingga kemandirian ekonomi belum sepenuhnya terbentuk.

Perbedaan karakter organisasi antara pemerintah desa dan sektor swasta turut memengaruhi ritme kolaborasi. Struktur birokrasi yang cenderung prosedural berhadapan dengan pola kerja korporasi yang lebih fleksibel dan cepat. Perbedaan ini memunculkan potensi miskomunikasi, terutama dalam hal penjadwalan program dan pengambilan keputusan operasional. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme adaptasi institusional agar perbedaan karakter tidak menghambat efektivitas kolaborasi.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga masih menjadi kendala yang signifikan. Kemampuan dalam mengelola usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta mengembangkan strategi

²¹ Y. Susanti dan A. Putra, “Indikator Pertumbuhan Ekonomi Desa,” Jurnal Ekonomi Pembangunan (2022)

pemasaran belum merata di kalangan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan kapasitas yang lebih sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk pelatihan teknis, tetapi juga pendampingan yang bersifat jangka panjang. Emerson et al. (2011) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas aktor sebagai bagian integral dari proses collaborative governance, terutama dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.²²

Pembacaan Teoretis terhadap Praktik Collaborative Governance

Anda Analisis terhadap praktik di Desa Curahsawo menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan kerangka teoretis collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007).²³ Proses interaksi yang bersifat deliberatif, keterlibatan multipihak, serta orientasi pada tujuan bersama menjadi elemen yang tampak dalam praktik kolaborasi di lapangan. Interaksi tersebut tidak hanya menghasilkan keputusan kolektif, tetapi juga membentuk pola relasi yang lebih egaliter antaraktor.

Penguatan dimensi kepercayaan dan legitimasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan kolaborasi. Pemerintah desa berperan sebagai aktor yang menjaga keseimbangan relasi sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap program yang dijalankan. Perspektif ini memperkuat argumentasi Febrian (2018) mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai sumber legitimasi dalam pembangunan perdesaan berbasis kolaborasi.²⁴

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya dinamika yang lebih kompleks dibandingkan model teoritis yang bersifat normatif. Relasi kekuasaan, perbedaan kapasitas, serta potensi ketergantungan menjadi variabel yang memengaruhi arah dan hasil kolaborasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik collaborative governance tidak selalu

²² Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29

²³ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2007): 543–571

²⁴ Rangi Ade Febrian, "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* (2018)

berjalan dalam kondisi ideal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan institusional yang spesifik.

Pendalaman Mekanisme Proses Kolaboratif: Interaksi, Kepercayaan, dan Kepemimpinan

Pendalaman terhadap praktik di Desa Curahsawo memperlihatkan bahwa efektivitas collaborative governance tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan pembagian peran, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses interaksi yang berlangsung secara berulang. Interaksi tersebut membentuk ruang negosiasi yang memungkinkan terjadinya penyesuaian kepentingan, pembentukan kesepahaman, serta penguatan komitmen kolektif. Dalam banyak kasus, keberlanjutan kolaborasi lebih bergantung pada intensitas komunikasi dibandingkan pada desain kelembagaan formal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dimensi kepercayaan muncul sebagai fondasi utama yang mengikat relasi antaraktor. Kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman kolaboratif yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan program, serta kemampuan aktor untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati. Pemerintah desa memainkan peran penting dalam memediasi hubungan ini, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan orientasi bisnis perusahaan. Literatur collaborative governance menempatkan trust sebagai variabel kunci yang menentukan keberhasilan kolaborasi, terutama dalam konteks yang melibatkan aktor dengan latar belakang institusional yang berbeda.²⁵

Kepemimpinan kolaboratif yang ditunjukkan oleh pemerintah desa juga menjadi faktor penentu dalam menjaga arah dan stabilitas kolaborasi. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator, melainkan sebagai aktor yang mampu membangun visi bersama, memfasilitasi dialog, serta mereduksi potensi konflik antar pihak. Gaya kepemimpinan semacam ini menunjukkan karakter transformasional yang menekankan pada penguatan kapasitas kolektif dibandingkan kontrol hierarkis. Dalam

²⁵ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29, John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Melissa M. Stone, "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging," *Public Administration Review* 75, no. 5 (2015): 647–663

praktiknya, kepemimpinan tersebut mampu menciptakan ruang deliberatif yang inklusif, sehingga masyarakat merasa memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Jika dibandingkan dengan temuan dalam berbagai studi sebelumnya, praktik collaborative governance di Desa Curahsawo menunjukkan kesamaan pada aspek integrasi aktor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Setiawati dan Suparti (2025) mengidentifikasi bahwa kolaborasi berbasis partisipasi mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi desa, terutama ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan.²⁶ Pola yang serupa terlihat di Curahsawo, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga aktor yang berkontribusi dalam menentukan arah program.

Di sisi lain, terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan studi yang menyoroti kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Curahsawo, keterlibatan sektor swasta membawa dinamika yang lebih kompleks, terutama terkait dengan orientasi keuntungan dan efisiensi bisnis. Apriliani et al. (2024) mencatat bahwa sektor swasta memiliki kecenderungan untuk mendorong efektivitas dan produktivitas, meskipun dalam beberapa kasus dapat memunculkan tekanan terhadap aktor lain untuk menyesuaikan ritme kerja.²⁷ Kondisi ini terlihat pada interaksi antara pemerintah desa dan PT Trion Indonesia Raya, di mana perbedaan orientasi kerja memerlukan proses adaptasi yang tidak sederhana.

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, terutama dalam hal kapasitas institusional dan struktur sosial masyarakat. Sørensen & Torfing, (2018) menekankan bahwa kolaborasi tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan yang ada dalam suatu wilayah.²⁸ Dalam

²⁶ B. Setiawati dan H. Suparti, "Kapabilitas Pemerintahan Desa dalam Collaborative Governance," PubBis (2025)

²⁷ A. Apriliani et al., "Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM," Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat (2024)

²⁸ Eva Sørensen dan Jacob Torfing, "The Democratizing Impact of Governance Networks: From Pluralization, via Democratic Anchorage, to Interactive Political Leadership," Public Administration 96, no. 2 (2018): 302–317

konteks Curahsawo, struktur sosial yang relatif kohesif menjadi faktor yang memperkuat efektivitas kolaborasi, meskipun tetap terdapat potensi ketimpangan relasi akibat perbedaan akses sumber daya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak collaborative governance di Desa Curahsawo tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan kelembagaan yang saling berkaitan. Peningkatan pendapatan masyarakat berjalan beriringan dengan perubahan pola pikir ekonomi, di mana masyarakat mulai mengadopsi orientasi usaha yang lebih adaptif terhadap pasar. Transformasi ini tidak terjadi secara linier, melainkan melalui proses pembelajaran kolektif yang difasilitasi oleh interaksi antaraktor dalam kolaborasi.

Pada dimensi sosial, kolaborasi memperkuat kohesi komunitas melalui peningkatan partisipasi dan interaksi antarwarga. Forum-forum dialog yang dibangun dalam kerangka kolaborasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan masalah bersama, serta mengembangkan strategi usaha secara kolektif. Proses ini menciptakan modal sosial yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program ekonomi desa.

Dari sisi kelembagaan, kolaborasi mendorong terbentuknya pola tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah desa tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal dalam pembangunan, melainkan sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling berinteraksi. Struktur ini memperlihatkan pergeseran dari model governance yang bersifat hierarkis menuju model yang lebih kolaboratif dan berbasis jaringan (*network governance*). Emerson et al. (2012) menggarisbawahi bahwa integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan collaborative governance.²⁹

Temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana collaborative governance dapat dioperasionalkan dalam konteks desa yang memiliki keterbatasan sumber daya. Model kolaborasi yang terbentuk di Curahsawo menunjukkan

²⁹ Emerson, Nabatchi, dan Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," 1–29.

bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberadaan aktor, melainkan pada kemampuan mengelola interaksi, membangun kepercayaan, serta menjaga keseimbangan relasi kekuasaan.

Konfigurasi kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat memperlihatkan potensi untuk direplikasi pada konteks desa lain dengan karakteristik serupa. Meskipun demikian, adaptasi terhadap kondisi lokal tetap menjadi prasyarat utama, terutama dalam hal struktur sosial, kapasitas institusional, serta tingkat partisipasi masyarakat. Literatur governance menegaskan bahwa tidak terdapat satu model kolaborasi yang bersifat universal, sehingga setiap praktik perlu disesuaikan dengan konteks spesifik yang dihadapi.³⁰

Di sisi lain, dinamika yang muncul dalam praktik Curahsawo menunjukkan perlunya perhatian terhadap isu ketergantungan dan ketimpangan relasi antaraktor. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan model collaborative governance yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas jangka pendek, tetapi juga pada kemandirian ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* antara Pemerintah Desa Curahsawo dan PT Trion Indonesia Raya telah membentuk pola kolaborasi yang integratif dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditopang oleh pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, tetapi juga oleh kualitas proses kolaboratif yang dibangun melalui komunikasi yang intensif, kepercayaan antarpemangku kepentingan, serta kepemimpinan yang adaptif. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung kelembagaan, PT Trion Indonesia Raya menyediakan dukungan sumber daya, teknologi, dan akses pasar,

³⁰ Bryson, Crosby, dan Stone, "Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations," 647–663.

sedangkan masyarakat bertransformasi dari penerima manfaat menjadi aktor yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Sinergi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha mikro, perluasan jaringan pemasaran, serta meningkatnya kapasitas manajerial dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh integrasi sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam mengelola berbagai tantangan yang muncul selama proses kolaborasi. Ketergantungan terhadap dukungan eksternal, perbedaan kapasitas antaraktor, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlangsungan kemitraan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat, pelembagaan mekanisme kolaborasi yang lebih inklusif, serta peningkatan kemandirian ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Temuan ini sekaligus memperkuat perspektif *collaborative governance* bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada penyatuan kepentingan dan sumber daya, tetapi juga pada terbentuknya relasi sosial yang kuat, tata kelola yang partisipatif, dan kapasitas kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, A., et al. (2024). *Collaborative governance dalam pengembangan UMKM*. Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat. <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Arsyad, L. (2016). *Economic development: The role of agriculture*

- in rural development. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(3), 309–327. <https://doi.org/10.22146/jieb.23254>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Febrian, R. A. (2018). *Collaborative governance dalam pembangunan kawasan perdesaan*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana>
- Irawan, B. (2017). Collaborative governance dalam pengelolaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 200–210.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Indeks Desa Membangun 2020*. <https://idm.kemendesa.go.id>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Setiawati, B., & Suparti, H. (2025). *Kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance*. PubBis. <https://journal.unesa.ac.id>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership. *Public*

Administration, 96(2), 302–317.
<https://doi.org/10.1111/padm.12406>